



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUDIRMAN**
2. Jabatan : **PANITERA PENGGANTI**
3. NHK : **452915**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 2.225.301.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 93 m2/85 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000
2. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 420 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 921.062.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 93 m2/30 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 157.239.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m2/149 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 572.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 47.000.000**

1. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
2. MOTOR, BEAT HONDA Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000
3. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 19.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 10.250.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ---**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 13.500.000**



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.296.051.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.296.051.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.